

**PENGELOLAAN KECEMASAN DAN KETIDAKPASTIAN DI KALANGAN
PENGUNGS PBB DI SEMARANG**

Bimo Andrio¹, Turnomo Rahadjo², Hapsari Dwiningtyas³

andriobimo@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The main goal of this study is to describe the anxiety and uncertainty management of refugees in Semarang. The research dive deeper into understanding and describing the communication anxiety and uncertainty faces by asylum seekers in Semarang and their struggle to manage it during their interval time for the asylum opportunities. The result of the study itself shows how the anxiety cause by dangerous is their migration journey and their living condition in Indonesia. With limited chance to form an effective communicate with the responsible immigration and United Nations representatives, the asylum seeker force to cope with current and very underwhelming living condition as well as limited access to public service without any meaningful solution or any communications process. There are also evidence of the how the refugees trying to make sense of the situation and starting to open them self to the local in order to reduce their anxiety. It is also worth to mention, even in the limited chance to make any impactful interaction with the IOM in Indonesia, the refugees found ways to extract information about their asylum status in which lower their feeling of uncertainty during this trying time.

Keywords: Asylum Seeker, Communication Anxiety and Uncertainty Management, Representatives of immigration and IOM.

ABSTRAK

Hal yang coba dicapai dari penelitian ini adalah membentuk deskripsi pengendalian kecemasan dan ketidakpastian yang dilakukan para pencari suaka di Semarang. Penelitian ini kemudian mencoba melihat secara mendalam lalu menjelaskan sebenarnya rasa kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi yang dihadapi para pencari suaka dan usaha mereka mengendalikannya selama waktu tunggu suaka mereka. Hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa perjalanan migrasi yang berbahaya serta kondisi tempat tinggal mereka di Indonesia merupakan sumber ketakutan utama mereka. Hal tersebut kemudian ditambah dengan terbatasnya kesempatan untuk bisa membentuk komunikasi yang efektif dengan perwakilan lembaga imigrasi dan PBB membuat para pengungsi terpaksa harus menghadapi keterbatasan menuju akses layanan umum serta tanpa adanya solusi komunikasi yang berarti mengenai suaka mereka. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan langkah-langkah yang diambil para pengungsi untuk memahami situasi tersebut dan mulai membuka diri mereka dengan warga lokal untuk mengurangi rasa takut mereka. Bahkan dengan keterbatasan kesempatan untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan IOM Indonesia. Para pencari suaka mampu menemukan solusi untuk mendapatkan informasi mengenai status suaka mereka yang membuat mereka mampu mengurangi rasa tidak pasti di masa yang sulit ini.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Pengendalian Kecemasan dan Ketidakpastian Komunikasi, Perwakilan Imigrasi dan IOM.

PENDAHULUAN

Proses relokasi para pengungsi sementara seperti para pengungsi konflik menuju lingkungan yang baru akan memunculkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya tantangan tersebut adalah kondisi ketidakpastian dan kecemasan mengenai status mereka. Disebabkan karena ketidakmampuan memahami informasi mengenai apa yang sedang terjadi, situasi tersebut juga terjadi akibat tidak mempunya seseorang memprediksi tindakan non-verbal atau

verbal apa yang harus mereka lakukan. Kecemasan sangat rentan menyerang mereka yang tidak memiliki kepastian akan informasi mengenai lawan komunikasi atau sebuah kondisi (Presbitro & Attar, 2018:36). Waktu tunggu status suaka yang bisa menembus 10 tahun dan tidak adanya informasi yang memberikan kepastian kepada mereka membuat banyak pengungsi merasa cemas akan masa depan mereka dan anggota keluarganya karena lamanya tinggal di negara transit tanpa sebuah

kepastian akan penempatan ulang atau *resettlement*. Para pengungsi pun mulai melakukan berbagai cara untuk mencari kejelasan seperti melalui protes ataupun tuntutan ke lembaga terkait.

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pengungsi konflik. Posisi Indonesia yang strategis menjadi pilihan bagi banyak pengungsi untuk datang dan memohon status pengungsi untuk dapat diberangkatkan menuju Australia, Selandia baru dan Kanada. Bukti partisipasi Indonesia adalah posisi Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi pencari suaka ke negara lain seperti Australia ataupun Selandia Baru. Hingga 2020, *United Nations High Comissions for Refugee* atau Komisi Tinggi PBB Untuk Pengungsi (UNHCR) mendata ada sekitar 13.657 pengungsi yang teregistrasi di Indonesia yang berasal dari 45 negara di mana saat ini tinggal di fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia dan UNHCR. Jumlah tersebut dapat dikatakan sangat besar mengingat Indonesia tidak menjadi bagian dari negara yang menanda tangani konvensi mengenai penanganan pengungsi 1951 ([UNHCR, 2020](#)).

Permasalahan ketidakpastian suaka ini menjadi penting diteliti di Indonesia khususnya di Semarang adalah karena

situasi geografi Indonesia yang strategis berada pada kawasan transit menuju Australia dan Selandia Baru. Hal tersebut menjadi momok karena meski jarang terekspos media, penyelundupan manusia baik yang berasal dari Indonesia ataupun yang masuk ke Indonesia merupakan permasalahan di beberapa wilayah seperti selat Malaka di antara semenanjung Malaya dan pulau Sumatera serta antara provinsi Kepulauan Riau dan juga Johor, Malaysia. Sementara itu, menurut pihak Australia menyatakan pada laporannya pada 2017 sekitar 90% pendatang gelap di Australia singga di Indonesia dengan lebih dari setengahnya melewati pulau Sumatera, Jawa, Bali dan pulau kecil lain di timur Indonesia seperti yang diterbitkan oleh [Tirto.id](#). Meski tidak memberikan data terperinci mengenai para pendatang gelap yang masuk ke Indonesia, badan PBB untuk narkoba dan kejahatan (UNDOC) dalam laporan tahun 2020 menyampaikan ada sekitar 50 ribu korban penyelundupan manusia di seluruh dunia dengan 20% diantaranya merupakan pencari suaka yang sebagian besarnya menggunakan jalur Asia selatan dan laut Mediterania (UNDOC, 2020:109).

Memahami permasalahan ini akan dimulai dari makna dari pengungsi sementara. Secara hukum definisi dari pengungsi adalah mereka yang berada

diluar dari negaranya dan melarikan diri atas dasar terjadinya diskriminasi karena alasan agama, ras, suku, afiliasi politik, atau kelompok sosial tertentu. Menyeberangi perbatasan negara lain adalah kunci untuk bisa didefinisikan sebagai pengungsi. Karena jika tidak maka mereka hanya akan disebut sebagai terusir atau *displaced* (Betts, 2017:22).

Proses pengurusan status bagi para pengungsi yang diikuti dengan penempatan ulang di negara tujuan merupakan rangkaian proses bagi para pengungsi yang telah didata dan mendapatkan identitas pengungsi dari UNHCR. Proses tersebut sebagian besarnya terjadi di negara transit atau perantara seperti Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang dan rumit. Ini karena Indonesia tidak menandatangani konvensi Wina 1951 mengenai penanganan pengungsi yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus diwakilkan oleh UNHCR dalam proses penentuan status pengungsi (RSD) yang menjadi determinan mengenai status pengungsi dan suaka mereka di suatu negara. Proses yang dimulai dari pendaftaran dan pemeriksaan calon penerima status pengungsi ini, hanya memberikan dua kali kesempatan kepada para pengungsi dan keluarganya untuk mendapatkan identitas yang kemudian dilanjutkan dengan penempatan mereka di fasilitas milik Rumah Detensi Imigrasi

(Rudenim) di beberapa kota di Indonesia sembari menunggu status suaka mereka diterima oleh negara tujuan ([UNHCR, 2020](#)).

Tidak berpartisipasi Indonesia dalam konvensi 1951 tentang pengungsi mengakibatkan mereka yang melarikan diri dari konflik di negara mereka dan tiba di Indonesia tanpa identitas, mereka rentan dikenakan pasal pelanggaran Undang-Undang No. 6 tahun 2011 mengenai imigrasi yang membuat imigran mendapatkan posisi sebagai pendatang gelap dengan akibat ancaman 10 tahun penjara atau deportasi ke negara asal. Tidak hanya itu para pengungsi yang sudah mendapatkan identitas dan RSD harus menunggu hingga bertahun-tahun di Indonesia dalam beberapa kasus mencapai 9 hingga 10 tahun tanpa kejelasan informasi mengenai solusi jangka panjang berupa pemberian suaka atau penempatan ulang di negara penerima seperti yang dijanjikan oleh UNHCR dan negara yang meratifikasi dokumen konvensi 1951 mengenai pengurusan pengungsi ([Beritasatu, 2021](#)).

Selain kesulitan pengurusan identitas, para pengungsi yang sebagiannya tidak mampu berbahasa Inggris atau Indonesia belum mengetahui urutan proses mendapatkan RSD dan selanjutnya status suaka. Hal tersebut diungkapkan oleh Gading Gumilang Putra yang merupakan

advokat dari Jesuit Refugee Service (JRS). Menurutnya faktor-faktor lain yang membuat mereka yang lari dari konflik gagal mendaftarkan diri sebagai pengungsi atau memenuhi syarat untuk mendapatkan RSD adalah ketakutan mereka akan pihak berwajib dan rasa trauma akibat konflik yang mereka alami. Rasa takut akan dideportasi juga banyak dirasakan oleh para pengungsi yang tidak memahami proses RSD akibat kurangnya informasi dan komunikasi yang efektif baik dari pihak UNHCR maupun imigrasi ([LBHI, 2019](#)).

Meski hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini masih jarang mendapatkan perhatian dan solusi yang baik karena minimnya kuasa pemberian status kependudukan atau pergerakan di negara transit seperti Indonesia. Selain itu tidak bersedianya negara penerima seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat memberikan informasi mengenai kepastian tentang jadwal, persyaratan, dan status penerima suaka ke negara mereka menyebabkan para pengungsi tertahan di Indonesia tanpa adanya informasi yang bisa mereka percaya. Seperti Australia misalnya, selain pengungsi harus menunggu di negara transit seperti Indonesia, para pengungsi harus tinggal di fasilitas detensi yang berada di Papua Nugini, Nauru dan Kepulauan Manus sebelum bisa diberangkatkan ke Australia dengan alasan

keamanan meski sebenarnya hal ini adalah satu bentuk pencegahan pengungsi lain untuk memilih Australia sebagai negara tujuan suaka ([The Guardian, 2020](#)).

Tidak adanya kejelasan informasi mengenai status suaka mereka, membuat para pengungsi yang berada di Indonesia merasa cemas dan melakukan beberapa protes di kantor *International Organization for Migrant* (IOM) di Indonesia dalam hal ini UNHCR dan kedutaan-kedutaan negara penerima. Seperti yang terjadi di Jakarta, para pengungsi melakukan protes dan meminta kejelasan mengenai status mereka di kantor perwakilan UNHCR di Jakarta pada Mei lalu. Selain melakukan protes, para pengungsi juga mendirikan kemah dan tinggal selama beberapa hari di trotoar di depan gedung perwakilan UNHCR di Jakarta. Tuntutan mereka adalah agar diberangkatkan dan meminta kejelasan mengenai status suaka mereka. Meski demikian pihak UNHCR dan kedutaan negara penerima tidak bisa memberikan kepastian mengenai status mereka. Karena selain pintu perbatasan negara penerima yang sedang ditutup untuk pergerakan imigran karena pandemi Covid-19, UNHCR juga menghentikan proses RSD dari para pengungsi yang berada di negara transit seperti yang berada di Indonesia ([Liputan 6, 2021](#)).

Meski protes serupa tidak terjadi di kota Semarang, perlu dipahami para pengungsi yang berada di fasilitas yang dikelola oleh Rudenim Semarang sebagian besarnya adalah pindahan dari kota lain di Indonesia seperti Jakarta, Makassar dan Medan. Mayoritas pengungsi di Semarang yang berasal dari provinsi Hazara, Afghanistan dan beberapa wilayah pesisir di Somalia. Mereka mengaku tidak ingin kembali ke negaranya akibat perang dan kekerasan yang terjadi. Seperti dikatakan Alisyah, seorang pengungsi sementara muda yang untuk sementara menetap di Wisma Husada hingga proses imigrasi ke negara penerima selesai. Menurutnya, ia tidak ingin kembali ke negara asalnya yaitu Afghanistan karena konflik yang berkepanjangan menyebabkan banyak anak-anak diculik dan dipaksa mengikuti perang, ia juga menuturkan kekerasan terhadap anak dan wanita sering terjadi di negara asalnya sehingga ia memilih untuk menetap di Indonesia jika diizinkan. Selain Alisyah, pengungsi anak lainnya seperti Maryam yang juga berasal dari Afghanistan mengaku masih trauma dengan kondisi konflik yang terjadi di sana ([Tribun Jateng, 2020](#)).

RUMUSAN MASALAH

Tidak adanya kewenangan pemerintah untuk menangani dan memberikan penyaluran informasi

mengenai status suaka membuat proses penanganan pengungsi sering sekali terhambat karena alasan tidak adanya partisipasi baik dari pemerintah Indonesia ataupun lembaga PBB yang ada di Indonesia seperti IOM.

Tidak hanya absennya informasi mengenai kepastian status suaka mereka pihak pemerintah juga tidak wajib menangani para pengungsi dari berbagai segi seperti perlindungan hukum, pemberian akses kependidikan dan pelatihan kepada para pengungsi. Tidak adanya pelayanan dibidang tersebut bahkan kepada para pengungsi yang sudah memiliki RSD menyebabkan banyak pengungsi merasa cemas dan tidak pasti akibat lamanya waktu tunggu dan tidak adanya informasi dari pihak IOM, imigrasi maupun kedutaan besar negara tujuan suaka. Tidak adanya layanan yang terintegrasi juga membuat para pengungsi yang baru datang di Indonesia dianggap sebagai imigran gelap dan dicurigai oleh pihak imigrasi sehingga rawan mendapatkan deportasi.

Kondisi yang terus menyulitkan para pengungsi tersebut membuat penelitian ini mencoba melihat pengalaman kecemasan dan ketidakpastian yang dialami oleh para pengungsi sementara yang sudah lama tinggal di Semarang dan belum

mendapatkan kejelasan mengenai status mereka.

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui proses manajemen kecemasan dan ketidakpastian oleh para pengungsi sementara PBB di Kota Semarang yang belum mendapatkan kejelasan mengenai status suaka mereka.

KERANGKA TEORI

Teori Pengendalian Kecemasan dan Ketidakpastian

Pada teori ini Gudykunst berargumen bahwa pada proses komunikasi antarbudaya dalam hal ini pada komunitas imigran, adanya rasa kecemasan dan ketidakpastian harus dimanfaatkan oleh para komunikator untuk tetap fokus dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berkebudayaan berbeda. Perlu dipahami juga bahwa menggunakan kecemasan dan ketidakpastian untuk meningkatkan fokus dalam kegiatan komunikasi tidak berarti melibatkan perasaan terancam atau bahaya melainkan saling memahami perbedaan dan ketidaktahuan masing-masing. (Littlejohn, 2017:397).

Ada tiga hal yang berkaitan dengan munculnya perilaku manajemen kecemasan dan ketidakpastian yaitu ekspektasi dari hubungan dimasa depan,

insentif nilai dari sebuah proses komunikasi dan tingkat penyimpangan.

Pada proses pengendalian kecemasan dan ketidakpastian ada tiga faktor yang memengaruhi prosesnya yaitu konsep diri, identitas grup, hubungan dengan orang asing dan variasi kebudayaan. Identitas kelompok merupakan sebuah kompetensi untuk mampu melihat tingkat kecemasan dan ketidakpastian saat sedang melakukan proses komunikasi dengan individu yang berasal dari kelompok yang berbeda. Karena ketika seseorang telah mengidentifikasi dirinya bagian dari satu kelompok dan menganggap orang lain sebagai orang asing yang ketika seseorang tersebut dapat memiliki tingkat kecemasan dan ketidakpastian yang rendah dengan memiliki ekspektasi positif dari proses komunikasi. Hal tersebut dapat membantu seseorang mengendalikan rasa cemas dan meningkatkan akurasi dalam memprediksi situasi yang sedang terjadi seperti menurut Gudykunst (2005) dalam (Diana, 2018:101).

Teori Perbedaan Adaptasi

Pada proses adaptasi yang dihadapi oleh para pencari suaka di lingkungan baru, tidak semua pengungsi mampu melakukan integrasi atau memilih untuk berasimilasi dengan lingkungan baru. Dialektika pertama dalam penelitian ini ialah

tergantung kepada individual, maksud dialektika ini adalah kemampuan imigran untuk beradaptasi dan mengatasi masalah yang ia hadapi, hingga mampu melakukan asimilasi merupakan hal yang bersifat individu dan bukan merupakan fenomena yang bersifat kelompok (Littlejohn, 2017:408).

Sementara itu dialektika yang kedua adalah mengenai bagaimana sebuah tindakan dari individu mampu merubah atau mempengaruhi sebuah sistem masyarakat atau lingkungan. Teori ini juga memberikan penjelasan unsur-unsur yang bisa menjadi penentu adaptasi para imigran di lingkungan barunya meski dengan adanya kekuatan asing beserta pihak berwajib yang mengatur hidup mereka. Bagi La Garza, adaptasi di tengah kendali agensi yang menguasai para imigran adalah dengan cara imigran memilih layanan yang ada atau sama sekali menghindari dan mencari cara berbeda untuk bisa menguasai diri dan memahami lingkungan (Littlejohn, 2017:408).

Teori Kontrak Budaya

Teori berikutnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana relasi kelompok berkuasa (dominan) dan mereka termarginalisasi bertahan dan berinteraksi. Pendekatan yang digagas oleh Ronald Jackson ini bermaksud mengetahui

bagaimana kelompok yang termarginalisasi seperti perempuan multirasial atau imigran secara tidak sadar menyetujui pra-kondisi yang diciptakan secara sistematis kelompok dominan (Littlejohn, 2017:417).

Asumsi yang pertama adalah, dalam mempertahankan identitasnya para kaum termarginalisasi berusaha untuk mencoba menjalani situasi yang telah disetujui seperti di penampungan pengungsi sebagai sebuah langkah yang harus mereka lakukan untuk melindungi diri sendiri. Persetujuan tersebut dalam konteks pengungsi adalah ditentukan oleh pihak berwajib dan masyarakat Indonesia dan harus mereka ikuti karena telah tiba dan menetap di lingkungan warga di Indonesia baik dalam waktu yang lama atau hanya sementara.

Meski demikian ada bentuk persetujuan lain dalam teori ini seperti yang mereka bentuk bersama pihak berkuasa atau yang masih bisa dinegosiasikan. Permasalahan negosiasi identitas dalam komunikasi ini erat kaitannya dengan adanya ekspektasi dari proses komunikasi yang dilakukan dengan kelompok dominan serta pengalaman dari proses komunikasi pernah terjadi.

Teori Akomodasi Komunikasi

Pendekatan komunikasi ini diperkenalkan orang Howard Giles ini memperkenalkan konsep tentang

bagaimana orang cenderung meniru mimik individu lain dalam berkomunikasi (Littlejohn, 2017:401). Dalam pendekatan ini sendiri dikenal hal yang disebut konvergensi dan divergensi.

Ada tiga asumsi yang dimunculkan dalam teori ini. Asumsi yang pertama adalah seluruh interaksi komunikasi tertanam karena adanya pengaruh dari proses komunikasi sebelumnya. Hal ini terjadi ketika seseorang mengalami pengalaman tertentu dengan pihak lain diproses komunikasi sebelumnya, sehingga melakukan aksi komunikasi tertentu pada pertemuan berikutnya.

Asumsi berikutnya adalah ketika proses pertukaran pesan yang dilakukan atas dasar kebutuhan informasi juga menjadi sarana negosiasi identitas dan budaya. Kondisi ini sering sekali terjadi dalam komunikasi antara mereka yang merupakan penutur asli sebuah bahasa dan mereka yang merupakan bukan penutur asli. Konteks dari perbedaan tersebut juga lebih dari sekadar bahasa, perbedaan budaya dan referensi sehingga proses akomodasi komunikasi dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas.

Asumsi ketiga adalah ketika berbagai pendekatan komunikasi yang bersifat konvergen dan divergen digunakan dalam sebuah proses komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan identitas. Terjadinya hal ini karena terkadang

konvergensi yang dilakukan tidak akan menimbulkan akomodasi khususnya dalam proses komunikasi dengan kelompok tertentu (Littlejohn, 2017: 402)

METODE PENELITIAN

• Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi deskriptif. Penelitian fenomenologi merupakan pendekatan kualitatif deskriptif berguna untuk melihat dan kemudian menjelaskan esensi dari pengalaman seseorang atau kelompok (Sugiyono, 2017:5).

Bergantung pada jawaban dari pengalaman sadar para informan dalam hal ini para pencari suaka yang berada di Semarang. Pendekatan fenomenologi sangat berfokus memberikan kesempatan kepada hal-hal yang intens yang dialami para pencari suaka khususnya mengenai kecemasan dan ketidakpastian informasi dan komunikasi yang mereka alami untuk keluar melalui penjelasan tanpa perlu menilai hal tersebut. (Merriam, 2016:26).

• Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan di fasilitas milik Rudenim Semarang. Berfokus pada pengendalian kecemasan dan ketidakpastian yang dilakukan pencari suaka di Semarang. Penelitian ini memiliki dua fokus, yaitu memahami sumber kecemasan dan ketidakpastian yang

dirasakan para pengungsi PBB dan bagaimana para pengungsi mengatasi rasa kecemasan dan ketidakpastian selama menunggu proses suaka mereka.

- **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wisma Husada, Semarang Barat, kota Semarang. Berlangsung antara April dan Agustus 2021 penelitian ini terhalang situasi PSBB darurat selama pandemi Covid-19.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Subjek dari penelitian ini adalah para pengungsi sementara yang terdaftar di bawah UNHCR yang berada di kota Semarang. Para informan sendiri akan berasal pengungsi dewasa atau orang tua yang sudah berada di Indonesia lebih dari 4 tahun. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai hal-hal apa saja yang membuat mereka merasa cemas dan tidak pasti dengan kondisi mereka, pertanyaan lain yang akan ditanyakan adalah bagaimana para pencari suaka mengendalikan kecemasan dan ketidakpastian dalam mencari informasi mengenai status suaka mereka. Sementara pertanyaan lain yang akan diajukan kepada para pengungsi sementara adalah bagaimana proses pengurangan ketidakpastian yang mereka lakukan menghadapi kondisi ketidakpastian informasi mengenai status suaka mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketakutan Selama Proses

Ketakutan selama proses migrasi yang dialami oleh para informan merupakan hasil dari proses dimana mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya kepada diri mereka maupun keluarga mereka. Para informan sama-sama datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Meski demikian, para pengungsi biasanya akan berada pada keadaan limbo tanpa perlindungan di mana mereka terancam untuk di deportasi dari negara transit.

Ketakutan tersebut diawali dari perjalanan mereka menuju negara transit. Para pengungsi menggunakan jasa penyelundupan manusia atau negara yang memberikan kebebasan visa untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara tujuan. Beberapa informan kemudian menyeberangi selat Malaka dengan bantuan para nelayan kedua negara dan para penyelundup untuk tiba di Medan sebelum mengalami penangkapan dan penahanan oleh pihak imigrasi di pulau Sumatera.

Para pengungsi tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat mereka tertangkap dan bagaimana proses yang akan dilakukan, kecurigaan oleh petugas selama ditahan akibat ketakutan akan keterlibatan beliau dengan terorisme ataupun narkoba

jaringan internasional yang membuat para pengungsi juga takut akan nyawanya jika ia diperlakukan tidak adil oleh petugas.

Kekhawatiran yang pengungsi rasakan juga tidak hanya mengenai bagaimana keadaan di negara mereka dan perjalanan mereka menuju Indonesia. Mereka juga takut akan kondisi status pengajuan suaka yang telah mereka lakukan. Para pengungsi mengutarakan bahwa mereka tidak mengetahui status suaka yang telah mereka ajukan dan merasa khawatir dengan proses yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa bahwa pihak IOM dengan sengaja tidak memproses suaka serta tidak memberikan pengetahuan negara yang akan menerima mereka sehingga membuat mereka tertahan bertahun-tahun di Indonesia tanpa ada informasi mengenai masa depan mereka di tengah masa pandemi.

Ketidakjelasan Proses Suaka

Ketika berbagi cerita mengenai lama waktu tunggu keberangkatan, mereka memberikan jawaban yang sangat mirip yaitu tidak ada yang tahu kapan mereka akan diberangkatkan atau negara tujuan mereka dan hanya keberuntungan yang bisa memberangkatkan mereka. Kondisi pandemi yang belum menemui titik akhir juga menyebabkan semua proses pengurusan suaka dihentikan sementara.

Namun selain karena faktor pandemi, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pengungsi mendapatkan suaka. Faktor tersebut adalah rendahnya resapan oleh negara penerima di mana dari 14.000 jumlah pengungsi di Indonesia hanya 500 yang bisa diberangkatkan dengan syarat tertentu. Ketentuan yang memberikan prioritas kepada pengungsi dengan keadaan tertentu seperti membutuhkan perawatan kesehatan, anak di bawah umur ataupun janda dengan anak mendapatkan prioritas keberangkatan. Kondisi tersebut jarang terjadi pada para pengungsi di Semarang, sehingga para pengungsi sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk diberangkatkan dan hanya bisa menunggu. Tidak adanya respon dari IOM di Indonesia dan situasi negara penerima yang mempersulit penyerapan pengungsi karena tidak menginginkan terlalu banyak pengungsi di negara mereka juga menjadi permasalahan ketidakpastian keberangkatan para pengungsi.

Kesulitan Informasi Suaka

Tidak adanya informasi setelah berbagai pendekatan yang dilakukan oleh para pengungsi membuat mereka merasa takut dan kecewa yang secara jelas tergambar dari pernyataan yang dilontarkan para informan. Pengungsi mengeluhkan tidak adanya kejelasan proses membuat mereka seolah-olah membuang waktu

mereka di Indonesia karena tidak ada perkembangan sama sekali. Keluhan tersebut juga berkaitan dengan keterbukaan informasi suaka yang sangat buruk dan memaksa keluarganya harus menunggu di tengah ketidakpastian tanpa perlindungan jika terjadi sesuatu. Hal itu karena pengungsi yang memiliki keluarga masih harus berkuat dengan mencari cara untuk mendapatkan akses menuju pendidikan, ekonomi dan hukum.

Para informan mengaku telah lama berkomunikasi secara pribadi dengan perwakilan IOM dan IDC baik yang berada di Semarang maupun di Jakarta. Meski demikian belum ada kepastian yang mereka dapatkan dari komunikasi lintas budaya yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Saat mereka berbagi pengalaman mengenai efek dari kemudahan sarana untuk berkomunikasi saat ini. Para pengungsi belum merasakan adanya keterbukaan informasi atau benefit yang berarti dari komunikasi mereka melalui berbagai sarana mulai dari surat elektronik, pesan pribadi maupun grup *WhatsApp*. Walaupun pengungsi sering berhubungan melalui kontak pribadi yang diberikan oleh perwakilan IOM, mereka sering kali hanya mendapatkan sebuah jawaban yang terkesan tidak memberikan kejelasan seperti perintah menunggu atau alasan adanya masalah karena Covid-19.

Kendali Diri Pengungsi

Situasi pengungsi di Semarang yang merupakan para pencari suaka yang sudah melakukan pengajuan permohonan suaka sejak beberapa tahun lalu. Karena tidak adanya informasi mengenai suaka yang bisa mereka dapatkan dari IOM di Semarang. Mereka mengambil solusi dengan menghubungi pihak IOM pusat di Jakarta dan langsung menanyakan kejelasan proses suaka mereka. selain itu, pengungsi juga melakukan langkah lebih dengan menghubungi kedutaan Australia untuk menceritakan diskriminasi yang ia alami karena adanya larangan dari IOM Semarang untuk membagikan permasalahan domestik di Wisma Husada yang menimpa mereka. Para pengungsi juga mencari solusi permasalahan pendidikan dan pelatihan kerja. Akses pendidikan menjadi salah satu hal penting karena terputusnya pendidikan anak-anak para pengungsi dan tidak memadainya akses pendidikan di Wisma Husada merupakan hal yang ditakutkan oleh para orang tua yang berada di pengungsian. Para pencari suaka yang memiliki anak mencari solusi kecemasan akan masa depan anak mereka menanyakan ketersediaan kuota untuk anaknya yang sudah memasuki usia sekolah dasar kepada pihak IOM.

Namun para pengungsi yang pernah atau membutuhkan akses ke pendidikan

tinggi belum mampu mendapatkan karena alasan dokumen. Meski demikian para pengungsi memilih tidak memperpanjang komunikasi dengan pihak pendidikan tinggi seperti universitas lokal dan memilih untuk menggunakan sarana pendidikan daring gratis seperti *Coursera*.

Pengurangan rasa cemas yang dialami para pengungsi juga merupakan usaha dari warga atau institusi lokal yang seperti melalui keterlibatan mereka dengan kegiatan masyarakat lokal baik yang bersifat formal seperti melalui pendidikan yang diberikan kepada anak-anak maupun pelatihan yang didapatkan orang tua mereka. Kegiatan non-formal seperti bergaul dengan masyarakat di sekitar pengungsian di mana para pengungsi mampu memiliki teman dan bahkan keluarga angkat yang merupakan warga lokal yang ikhlas membantu mereka dalam hal kebutuhan sehari-hari dan mengurangi ketakutan mereka terhadap proses yang sedang berlangsung.

Upaya Pengurangan Ketidakpastian

Hal yang secara umum dilakukan atau dialami oleh para pengungsi di Semarang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti sumber informasi dan pengetahuan mereka mengenai proses yang seharusnya ada. Ketika membahas mengenai sosok

atau organisasi yang mereka gunakan dalam mencari informasi. Pengungsi mengungkapkan bahwa hubungan mereka dengan perwakilan IOM merupakan interaksi langsung yang mereka lakukan dalam mencari informasi mengenai suaka atau kebutuhan di penampungan. Pak Nyoman yang merupakan perwakilan IOM di Semarang merupakan sosok yang para pengungsi hubungi dalam keseharian mereka.

Para pengungsi juga cenderung memiliki cara yang mirip dalam mencari informasi mengenai status suaka yang mereka lakukan. Mereka mengandalkan kooperasi dan secara aktif berkomunikasi dengan pihak IOM dan IDC untuk mencari solusi baik mengenai suaka maupun hal yang bersifat domestik. Kegiatan tersebut mulai dari langkah-langkah yang konvensional seperti menghubungi perwakilan IOM di Semarang dan Jakarta serta mengajak mereka berdiskusi mengenai solusi dari permasalahan ini. Bentuk kooperasi lain yang dilakukan para pengungsi adalah secara aktif menjadi bagian dari IOM dengan berpartisipasi membantu pengungsi lain sebagai penerjemah yang membantu para pekerja IOM dan pengungsi dalam hal perantara bahasa. Hal ini merupakan sesuatu yang unik, di mana para pengungsi memilih

untuk menghubungi pihak di luar penampungan untuk informasi mereka.

Usaha para pengungsi yang telah mencari informasi suaka mereka, kini mulai menemukan titik temu dari rasa penasaran mereka kepada status suaka mereka. Penelitian ini secara singkat mendeskripsikan jawaban yang didapatkan oleh para informan sebagai sebuah jawaban dari sistem imigrasi yang memperlambat pergerakan imigran dari negara transit. Analisis dari jawaban menunjukkan bahwa yang memperkecil kans mereka menuju negara penerima adalah persetujuan pihak UNHCR dan kedutaan besar negara penerima itu sendiri.

Keberanian para pengungsi untuk mencari informasi suaka bukan hanya karena mereka memiliki kontak pribadi perwakilan IOM di Semarang, namun juga karena mayoritas pengungsi telah mampu mengatasi batasan bahasa yang pernah menghalangi mereka untuk berkomunikasi. Mayoritas informan memang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia saat baru tiba. Para pengungsi mengungkapkan kegiatan bersama warga lokal seperti melalui pelatihan kerja, pertemanan, dan pendidikan merupakan cara para informan untuk bisa belajar dan mempraktikkan kemampuan bahasa Indonesia mereka.

KESIMPULAN

Melalui esensi yang terbentuk, dapat dilihat sumber ketakutan mereka di negara asal yang memaksa mereka bermigrasi adalah sebagai berikut.

- Pada saat mereka mengalami persekusi di negara asal informan di mana mereka disiksa dan mendapatkan ancaman pembunuhan oleh rezim dan konflik seperti perang saudara yang berkepanjangan juga menjadi alasan para informan melarikan diri dari negara mereka karena demi menyelamatkan nyawa mereka yang terancam akibat perang seperti di Somalia di mana para informan bisa terbunuh atau dipaksa menjadi tentara militan jika bepergian di luar kota mereka.

Sementara itu, secara esensial juga dapat dilihat bahwa kondisi perjalanan mereka menuju Indonesia juga menjadi sumber kecemasan karena hal sebagai berikut.

- Perjalanan yang berbahaya menjadi sumber ketakutan para informan karena sebagian besar mereka merupakan korban penyelundupan manusia yang meninggalkan keluarga tanpa ada komunikasi

interaksi selama berbulan-bulan dengan kondisi yang mengesankan.

- Informan yang menjadi korban penyelundupan menggunakan kebijakan Malaysia yang memberikan bebas visa kepada negara dari timur Afrika seperti Somalia untuk masuk ke Indonesia.
- Sementara informan yang tidak menjadi korban penyelundupan manusia, mereka menggunakan kebijakan bebas visa di Indonesia untuk menetap secara ilegal sebelum tertangkap pihak imigrasi.
- Para informan kemudian ditangkap oleh pihak imigrasi dan dijebloskan ke tahanan imigrasi dengan beberapa pengungsi dimasukkan ke tahanan isolasi tanpa negosiasi akibat dicurigai sebagai teroris atau penyelundup narkoba.

Sumber ketakutan lainnya yang juga muncul dari esensi adalah diskriminasi menuju akses layanan publik dan hak mereka seperti berikut.

- Layanan pendidikan vokasi bagi orang dewasa yang berupa pelatihan kerja diputus pada 2017 tanpa ada pengganti sehingga para orang tua dan pengungsi dewasa hanya bisa menganggur tanpa ada kegiatan

yang bermanfaat atau yang bisa mereka bawa ke negara penerima.

- Diskriminasi layanan menuju pendidikan tinggi seperti universitas di Indonesia karena status mereka yang merupakan pencari suaka sehingga dilarang untuk mengenyam pendidikan tinggi.
- Layanan hukum yang rumit dan sering sekali hanya diselesaikan secara sepihak seperti pengungsi yang terlibat konflik dengan pengungsi lain atau mendapatkan ancaman pembunuhan. Masalah tersebut tidak akan diselesaikan pihak kepolisian dan hanya akan berhenti pada tingkat Rudenim di mana pengungsi dimasukkan ke isolasi atau dipindahkan ke kota lain.
- Hak pengungsi untuk mendapatkan perkembangan informasi suaka tidak dipenuhi oleh IOM Semarang. Pihak tersebut belum bisa memberikan informasi mengenai status pengajuan suaka pengungsi, bahkan para pengungsi merasa pihak IOM tidak peduli dengan hal tersebut.

Berikutnya adalah hal-hal yang menjadi sumber ketakpastian bagi para pencari suaka yang berada di Semarang. Hal yang

membuat mereka tidak pasti mengenai nasib status mereka adalah hal-hal berikut.

- Karena waktu tunggu yang tidak lagi dapat diterima, di mana pengungsi yang sudah menunggu sangat lama, bahkan ada informan yang sudah hampir delapan tahun menunggu tanpa ada kepastian akan keberangkatan.
- Para pengungsi mengeluhkan bahwa syarat keberangkatan yang mengutamakan mereka yang membutuhkan perawatan medis dan anak-anak tanpa orang tua, membuat para pengungsi sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk berangkat ditambah lagi kebijakan negara penerima.

Pengendalian rasa cemas yang dilakukan pengungsi sangat erat kaitannya dengan komunikasi mereka dengan warga lokal dan langkah pengungsi mencari solusi permasalahan mereka secara sendiri seperti berikut ini.

- Para pengungsi berinteraksi dengan warga lokal melalui berbagai kegiatan baik informal maupun formal seperti melalui sekolah. Hal tersebut sangat berperan mengurangi rasa cemas bagi para pengungsi karena para warga lokal dan organisasi warga juga

memberikan pengungsi kesempatan untuk mendapatkan akses ke pelatihan vokasi, pendidikan formal bagi anak-anak mereka dan kesempatan bagi pengungsi untuk mengikuti kegiatan warga lokal.

- Pengungsi memilih warga lokal untuk membantu mengurangi rasa cemas mereka karena adanya rasa keterbukaan antar pengungsi dan warga lokal hingga mereka bisa memiliki keluarga angkat dan teman warga lokal.
- Para pencari memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan pribadi seperti masalah depresi atau konflik dengan orang tua lain secara pribadi baik melalui konsultasi dengan ahli atau menahan diri permasalahan pada sendiri.

Upaya pengurangan ketidakpastian yang dilakukan para pengungsi dilakukan dengan upaya yang interaktif. Hal tersebut karena para pengungsi rutin berkomunikasi dengan pihak IOM Semarang, meski demikian para pencari suka juga melakukan berbagai pendekatan lain seperti berikut.

- Para pengungsi lebih memilih menghubungi pihak IOM pusat dan kedutaan negara terkait untuk mengadukan keluhan atau bertanya

informasi suaka karena menganggap pihak IOM Semarang tidak mampu memberikan jawaban.

- Para pencari suaka juga mencoba mengurangi ketidakpastian dengan berpartisipasi aktif dalam mengajak pihak IOM untuk berdiskusi dan membantu pihak IOM Semarang menjalankan tugasnya melalui partisipasi mereka sebagai penerjemah.
- Selain itu, melalui proses yang sudah mereka lalui dan informasi yang mereka terima, para pengungsi mengetahui bahwa alasan mereka belum diberangkatkan adalah karena pihak negara penerima serta IOM Indonesia belum menyetujui suaka mereka.
- Para pencari suaka menggunakan kegiatan bersama warga lokal untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk mengurangi keterbatasan bahasa yang terjadi.

REKOMENDASI

Saran yang bisa diberikan peneliti kepada mereka yang tertarik untuk mendalami penelitian mengenai komunikasi antar budaya dan imigran di Indonesia. Sangat disarankan untuk melakukan riset mengenai negosiasi konflik yang dilakukan antar pengungsi di

penampungan pengungsi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

United Nations on Drugs and Crime. 2020. *Global Report on Trafficking in Persons*. Geneva: United Nations.

Betts, Alexander. Paul Collier. 2017. *Refuge Transforming a Broken Refugee System*. London: Penguin Random House.

Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, John G. Oetzel. 2017. *Theories of Human Communication*. Illinois: Wave Land Press Inc.

Diana, Afriyanti., Eduard Lukman. 2018. *Pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi antarbudaya antara auditor dan auditee*. Jurnal Komunikasi Indonesia. 7, 99-108.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Merriam, Sharan B., Elizabeth J. Tisdell. 2016. *Qualitative Research a Guide to Design and Implementation Fourth Edition*. San Fransisco: Jossey-Bass

UNHCR Indonesia. 2020. "Data jumlah pengungsi internasional dan yang berada di Indonesia", <https://www.unhcr.org/id/>, diakses pada 10 November 2020 pukul 19.17 WIB.

UNHCR Indonesia.2020.”*Proses pengajuan dan penentuan status pengungsi*”, <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 10.42 WIB.

Fikri, Chairul. 2021. “*Pencari Suaka Minta dipindahkan Dari Indonesia*”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/755957/pencari-suaka-minta-dipindahkan-dari-indonesia>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 11.32 WIB.

LBH Jakarta. 2019. “*Hak dan Perlindungan Pencari Suaka di Indonesia*”, <https://bantuanhukum.or.id/hak-dan-perlindungan-pencari-suaka-di-indonesia/>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 13.20 WIB.

Ryan, Hannah. 2020. “*Revealed: 1500 People in Limbo Under Australia’s Bizzare and Cruel Refugee Detereence Policy*”, <https://www.theguardian.com/aust>

[ralia-news/2020/dec/10/lives-in-limbo-more-than-1500-asylum-seekers-still-face-uncertain-future](https://www.theguardian.com/australia-news/2020/dec/10/lives-in-limbo-more-than-1500-asylum-seekers-still-face-uncertain-future), diakses pada 20 Juni 2021 pukul 13.58 WIB.

Putri, Arny Christika. 2021. “*Foto: Pencari Suaka Tinggal di Trotoar Kebon Sirih*”, <https://m.liputan6.com/news/read/4547144/foto-para-pencari-suaka-tinggal-di-trotoar-kebon-sirih?page=1>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 14.22 WIB.

Gumilang, Akhtur. 2020. “*Kisah Mariam Bocah Pengungsi Afghanistan: Saya Bersyukur Tinggal di Indonesia, Tak Mau Lagi Kembali Kesana*”, <https://jateng.tribunnews.com/2020/03/02/kisah-maryam-bocah-pengungsi-afganistan-saya-bersyukur-tinggal-di-indonesia-tak-mau-balik-ke-kesana?page=all>, dikases pada 20 Juni 2021 pukul 11.09 WIB.